Kajian Praktik Penjaminan Mutu Terhadap Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Di Universitas Ichsan Gorontalo

Sri Meike Jusup¹, Syamsul², Pemy Cristiaan³

DOI: <https://doi.org/10.36339/jaspt.v4i2.332>

1. Program Studi Manajemen
Universitas Ichsan Gorontalo
Jl. Achmad Nadjamuddin,
No.17 Kota Gorontalo

Abstrak

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah IX Sulawesi, dimana Tahun 2019 sebanyak 11 PTS yang dicabut izinnya karena tidak mampu melakukan aktivitas akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Ichsan Gorontalo khususnya sebagai perguruan tinggi swasta di bawah naungan LLDIKTI wilayah IX Sulawesi juga mendapatkan sanksi administrasi, hal ini dikarenakan dari hasil pemeriksaan Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristek Dikti ditemukannya pelaksanaan kegiatan akademik tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya penting mengkaji lebih dalam praktik penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dapat dilihat dari ketersediaan dokumen standar. Akan tetapi, masih terbatasnya penunjang pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo dari aspek sumber daya manusia dan pendanaan. Proses penetapan standar pada Universitas Ichsan Gorontalo belum melibatkan pihak eksternal dalam hal ini *stakeholder* yang berimplikasi pada pelaksanaannya yang tidak konsisten dalam memenuhi isi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang minim membuat pelaksanaan standar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan

Email:

¹ srimeikejusup@gmail.com

² tomallawa@gmail.com

³ pemychristiaan1802@gmail.com

Submitted :
September 2020

Accepted :
Oktober 2020

Kata Kunci: *Penjaminan Mutu; Standar Nasional Pendidikan; Universitas Ichsan Gorontalo*

PENDAHULUAN

Masalah pemenuhan SNPT kian menjadi fenomenal dengan melihat banyaknya perguruan tinggi yang harus berurusan dengan Kemenristek Dikti dikarenakan tidak terpenuhinya SNPT dan keluarnya dari koridor penyelenggaraan pendidikan. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Tahun 2018 merilis sebanyak 243 perguruan tinggi yang di non aktifkan Tahun 2016. Lebih lanjut tahun 2017 terdapat 59 diberikan sanksi administratif berat. Hal ini juga terjadi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah IX Sulawesi, dimana Tahun 2019 sebanyak 11 PTS yang dicabut izinnya karena tidak

JAS-PT

JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI

ISSN 2580 – 5339

eISSN 2620 – 5718

Volume 4

Nomor 2

DESEMBER 2020

Hal 97 – 108

FORUM DOSEN INDONESIA

mampu melakukan aktivitas akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Universitas Ichsan Gorontalo merupakan salah satu PTS yang dibawa naungan LLDKTI Wilayah IX yang juga mengalami permasalahan terkait pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Status Universitas Ichsan Gorontalo hingga bulan Agustus 2019 pada Forlap Dikti masih dalam status pembinaan, hal ini dikarenakan dari hasil pemeriksaan Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristek Dikti ditemukannya pelaksanaan kegiatan akademik tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan perundang-undangan, sehingga Universitas Ichsan Gorontalo diberikan sanksi administrasi. Tentunya permasalahan ini mengindikasikan belum optimalnya praktik penjaminan mutu yang dilakukan di Universitas Ichsan Gorontalo, sehingga pemenuhan standar nasional pendidikan masih jauh dari harapan sebagaimana dalam peraturan yang berlaku

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah mengkaji praktik penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sehingga memberikan manfaat dalam membenahi kekurangan dan memperbaiki seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hasil penelitian Sulaiman & Wibowo, (2016) mengemukakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan dengan menyusun rancangan operasional siklus SPMI, namun yang menjadi penghambat implementasi dikarenakan kurangnya komitmen pimpinan, jumlah auditor yang masih terbatas, dan kegiatannya terjebak pada kegiatan rutin. Sedangkan menurut hasil penelitian Safi'i & Vidy, (2017) mengemukakan bahwa proses sosialisasi manual prosedur dalam hal ini standar akademik dan kebijakan akademik hanya sebatas dilakukan pada saat rapat saja, sehingga akses terhadap pihak yang membutuhkan menjadi terbatas. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah sistem yang berbasis web dalam membantu menjalankan sistem penjaminan mutu. Begitupun hal dari hasil penelitian Suryaningsih & Imron, (2019) juga mengemukakan bahwa pada lokasi penelitiannya belum melaksanakan sistem penjaminan mutu sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi seperti belum tersedianya panduan sistem penjaminan mutu, komitmen pimpinan, anggaran infrastruktur akademik, dukungan SDM, sistem informasi teknologi.

Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara (UU Nomor 12 Tahun 2012). Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (PermenristekDikti Nomor 62 Tahun 2016).

Menurut Adina menegaskan bahwa penjaminan mutu di perguruan tinggi secara keseluruhan sangat penting sebab sasaran pendidikan bukan hanya untuk akademik semata, akan tetapi keseluruhan pribadi. Namun dalam sisi lain Tsui mengemukakan bahwa kehadirannya dapat didasari alasan lain seperti ketidakpuasan dari tenaga kependidikan dan mahasiswa serta desakan karena terbatasnya dana dan paling penting ialah tuntutan untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap kelembagaan. Lebih lanjut Achmad Anwar Abidin bahwa mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih kalah dibanding Negara-negara tetangga kita di kawasan Asia Tenggara. Itulah sebabnya

upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi perhatian para pakar pendidikan dan pemerintah untuk mewujudkannya (Fitrah, Ruslan, & Hendra, 2018).

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan (UU Nomor 12 Tahun 2012). Sistem penjaminan mutu terdiri dari SPMI dan SPME. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi berdasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: (a) akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan (b) nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana (PermenristekDikti Nomor 62 Tahun 2016).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Menurut Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah membuat pedoman dalam pelaksanaan SPMI yang bertujuan untuk memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang pada umumnya terkandung dalam SPMI di suatu perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi, struktur, sumber daya, dan pola kepemimpinan. Agar perguruan tinggi senantiasa mampu memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholders yang terus berkembang, maka SPMI juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tersebut secara berkelanjutan (*continuous improvement*) (Sulaiman & Wibowo, 2016).

JAS-PT

JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI
ISSN 2580 – 5339
eISSN 2620 – 5718
Volume 4
Nomor 2
DESEMBER 2020
Hal 97 - 108

FORUM DOSEN INDONESIA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Ichsan Gorontalo

Universitas Ichsan Gorontalo merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terdapat di Provinsi Gorontalo di bawah naungan Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. YPIPT Ichsan Gorontalo mulanya melaksanakan pendidikan setara dengan Diploma Satu untuk bidang Komputer dan Akuntansi. Pada tahun 2001 terbentuklah perguruan tinggi dengan nama Universitas Ichsan Gorontalo. Visi yang dibangun diawal berdirinya Universitas Ichsan Gorontalo adalah "Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermoral, inovatif dan interpreneur". Kemudian pada tahun 2017 visi Universitas Ichsan Gorontalo berubah menjadi "Menjadi Universitas Rujukan Dalam Penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Berbasis Technopreneurship". Universitas Ichsan Gorontalo terdiri dari 6 fakultas dan 12 program studi dengan jumlah total mahasiswa yang aktif tahun akademik 2019/2020 sebanyak 4.437.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengatakan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, dunia kerja, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Universitas Ichsan Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi membentuk Sistem Penjaminan Mutu dengan nama Lembaga Sistem Penjaminan Mutu disingkat LSPM. Sebagaimana dalam Statuta Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2019 perubahan Statuta tahun 2016 menempatkan Lembaga Sistem Penjaminan Mutu (LSPM) sebagai unsur pelaksana penunjang dalam mendukung kelancaran kegiatan pokok Universitas. LSPM di dalam struktur tata kerja organisasi di bawah langsung oleh Rektor. LSPM Universitas Ichsan Gorontalo di bantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tingkat Program Studi.

Penerapan sistem penjaminan mutu Universitas Ichsan Gorontalo dilakukan dengan langkah menyusun siklus penjaminan mutu yaitu a) penetapan standar, b) pelaksanaan, c) monitoring, d) evaluasi diri secara sistematis dan berkala, e) audit internal, f) penyusunan rekomendasi tindakan perbaikan (rumusan koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan, seperti gambar berikut:

Perumusan siklus sistem penjaminan mutu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu lima langkah penjaminan mutu (a) penetapan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) pengendalian, dan (e) peningkatan mutu atau di singkat PPEPP. Selain itu, penerapan sistem penjaminan mutu mempertimbangan masukan dari *stakeholder* dan kebijakan-kebijakan dari Dirjen Dikti sebagai koreksi perbaikan dalam merumuskan standar yang telah ditetapkan dan sebagai bahan dalam merumuskan standar baru yang akan ditetapkan. Selain itu di dalam proses penetapan standar tentunya harus direncanakan, dimana perencanaan sistem penjaminan mutu di tuangkan dalam sebuah dokumen SPMI sebagaimana dalam Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yang meliputi dokumen kebijakan, dokumen manual, dokumen standar, dan dokumen formulir.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting penggerak roda organisasi. SDM yang berkualitas tentunya akan berdampak terhadap kemajuan organisasi, begitupun halnya perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan visi perguruan tinggi pada khususnya. SDM menjadi hal penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penjaminan mutu. Saat ini, jumlah SDM yang mengelolah penjaminan mutu pada tingkat Universitas terdiri dari Ketua satu orang, sekretaris satu orang, bidang sosialisasi dan implementasi SPM satu orang, bidang pengendalian mutu dan dokumen satu orang, dan bidang pengembangan kurikulum satu orang. Secara kompetensi, SDM Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Universitas Ichsan Gorontalo belum memiliki tenaga auditor internal maupun eksternal internal, serta belum memiliki asesor BAN PT. Selain itu, pengelola penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo masih bergelar Magister. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dari aspek sumber daya manusia yang dimiliki LSPM Universitas Ichsan Gorontalo belum cukup memadai.

2. Aspek Pendanaan SPM

Pendanaan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat krusial dikarenakan setiap kegiatan yang direncanakan hingga pelaksanaan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo sangat tergantung dari ketersediaan anggaran. Jika melihat dari segi besaran anggaran untuk operasional penjaminan mutu dapat dikatakan belum cukup memadai, dikarenakan di Universitas Ichsan Gorontalo yang tergolong perguruan tinggi swasta terbesar di provinsi Gorontalo yang terdiri dari 6 fakultas dan 12 program studi, maka dengan besaran anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh kegiatan penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo. Aspek sumberdaya manusia dan anggaran menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang roda organisasi termasuk keberhasilan Universitas Ichsan Gorontalo dalam mewujudkan mutu pendidikan. Sebagaimana hasil penelitian Aspranawa (2015) mengemukakan bahwa *quality assurance* di dalam sebuah organisasi dapat dicapai secara maksimal jika didukung ketersediaan sumber daya yakni sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana, lingkungan kerja, dan budaya kerja yang saling bersinergi. Tujuan ini tidak lain untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan kualitas organisasi pendidikan tinggi dan mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional.

3. Ketersedian Dokumen SPM

Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu berbunyi bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai tugas menyusun dokumen SPMI yaitu dokumen

JAS-PT
JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI
ISSN 2580 – 5339
eISSN 2620 – 5718
Volume 4
Nomor 2
DESEMBER 2020
Hal 97 - 108

FORUM DOSEN INDONESIA

kebijakan, dokumen manual, dokumen standar, dan dokumen formulir. Dokumen-dokumen tersebut memuat standar yang harus dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan. Ketersediaan dokumen SPMI pada Universitas Ichsan Gorontalo sebagaimana dari hasil studi dokumen oleh peneliti menemukan bahwa Universitas Ichsan Gorontalo memiliki dokumen SPMI yang terdiri dari dokumen kebijakan, dokumen manual, dokumen standar, dan dokumen formulir. Setiap dokumen berisi muatan sesuai dengan buku pedoman SPMI tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Selain itu, dokumen standar SPMI Universitas Ichsan Gorontalo memuat 24 standar sebagaimana standar nasional perguruan tinggi ditambah dengan 3 standar yang ditetapkan oleh Universitas Ichsan Gorontalo. Setiap standar yang terdapat pada dokumen didukung dengan ketersediaan dokumen standar operasional prosedur.

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Ichsan Gorontalo melalui Lembaga Sistem Penjaminan Mutu telah berupaya melakukan pelaksanaan penjaminan mutu berdasarkan siklus yang ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu internal, namun jika dilihat dari aspek sumber daya manusia yang dimiliki terlihat bahwa minimnya personil yang dimiliki oleh Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Universitas Ichsan Gorontalo dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan penjaminan mutu, terlebih lagi bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini tenaga auditor eksternal yang belum dimiliki Universitas Ichsan Gorontalo. Pada aspek pendanaan yang masih terbatas jumlahnya juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo. Pada aspek ketersediaan dokumen sebagaimana yang dikemukakan menunjukkan bahwa LSPM telah memiliki seluruh dokumen sebagaimana dalam dokumen yang direkomendasikan dalam pedoman penerapan sistem penjaminan mutu internal. Hal ini sejalan yang dikemukakan dalam hasil penelitian Sulaiman & Wibowo, (2016) bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem penjaminan mutu adalah kurangnya komitmen pimpinan dan terbatasnya tenaga auditor yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Sedangkan menurut Aspranawa (2015) dalam hasil penelitian mengemukakan bahwa *quality assurance* dalam sebuah organisasi akan berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal apabila didukung dengan ketersediaan sumber daya dalam organisasi.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo

Tujuan sistem penjaminan mutu adalah untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Selain itu, menjamin pembelajaran pada program studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi. Selain itu perguruan tinggi harus menetapkan standar melebihi standar nasional pendidikan tinggi. Adapun standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Universitas Ichsan Gorontalo sebagai perguruan tinggi yang berada di Provinsi Gorontalo wajib memenuhi standar nasional perguruan tinggi. Pemenuhan Standar nasional perguruan tinggi Universitas Ichsan Gorontalo terlihat dari perumusan standar, penetapan standar, hingga pelaksanaan standar sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan:

Universitas Ichsan Gorontalo telah menetapkan standar pendidik melampaui standar nasional pendidikan tinggi pada bidang pengajaran yaitu terdiri dari (a) standar kompetensi lulusan (b) standar isi Pembelajaran (c) standar proses Pembelajaran (d) standar penilaian pendidikan Pembelajaran (e) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (f) standar sarana dan prasarana Pembelajaran (g) standar pengelolaan (h) standar

JAS-PT

JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI
ISSN 2580 – 5339
eISSN 2620 – 5718
Volume 4
Nomor 2
DESEMBER 2020
Hal 97 - 108

FORUM DOSEN INDONESIA

pembiayaan Pembelajaran, (i) standar suasana akademik. Standar tersebut kemudian di tuangkan dalam dokumen standar SPMI Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagaimana dalam siklus penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa penetapan hingga pelaksanaan standar yang ditetapkan hendaklah melalui proses dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Dari hasil wawancara peneliti dan studi dokumentasi yang diperoleh dari hasil laporan evaluasi Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Universitas Ichsan Gorontalo. Pada standar kompetensi lulusan semua program studi lingkup Universitas Ichsan Gorontalo telah menyusun profil lulusan berdasarkan capaian pembelajaran, namun masih terdapat beberapa program studi yang belum menetapkan profil lulusannya dalam sebuah surat keputusan. Semua lulusan program studi memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 ke atas, dan semua lulusan telah dilakukan penilaian kinerja lulusan program studi. Mata kuliah sebagai penciri Universitas Ichsan Gorontalo adalah mata kuliah Kewirausahaan, namun terdapat program studi yang tidak memasukkan mata kuliah Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib pada kurikulum program studinya.

Standar isi pembelajaran merupakan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran Universitas Ichsan Gorontalo. Kurikulum sebagai bagian dalam standar isi pembelajaran harus disusun berdasarkan kompetensi lulusan dan dievaluasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program studi lingkup Universitas Ichsan Gorontalo telah menyusun kurikulum dan mengevaluasi kurikulum, namun pada proses evaluasi kurikulum setiap program studi melakukan evaluasi yang beragam, ada yang melakukan evaluasi 3 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali dan terdapat juga program studi yang melakukan evaluasi kurikulum 5 tahun sekali. Selain itu dalam melakukan evaluasi penyusunan kurikulum terdapat program studi yang melakukan dalam bentuk loka karya, terdapat pula program studi yang hanya dalam bentuk rapat internal, pada hal dalam pernyataan standar isi pembelajaran dimana kurikulum hendaknya dilakukan evaluasi 5 tahun sekali dan dilakukannya dalam bentuk loka karya dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Selain itu, rata-rata lama mahasiswa pada program studi menyelesaikan studinya yaitu 4 sampai 5 tahun, dan rata-rata beban studi mahasiswa per semester pada program studi beragam, ada yang lebih 21 SKS, ada 21 SKS dan ada juga yang 20 SKS. Jika merujuk pada standar isi pembelajaran dimana standar yang ditetapkan bahwa rata-rata lama studi mahasiswa adalah 4,5 tahun dan rata-rata beban studi mahasiswa persemester sebesar 20 SKS. Hal yang sama terjadi dalam penyusunan kalender akademik, dimana kalender akademik yang telah disusun oleh pimpinan perguruan tinggi tidak melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo.

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran pada lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dapat dilihat dari rencana pembelajaran dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat dosen yang belum mengumpulkan RPS pada program studi. Selain itu, pembimbing akademik atau penasehat akademik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran dalam mengayomi mahasiswa selama studi pada setiap program studi, dimana terlihat bahwa masih terdapat dosen penasehat akademik yang tidak aktif membimbing mahasiswa. Hal yang tidak kalah penting adalah ketersediaan laporan setiap program studi sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kekurangan dan kelemahan harus tercatat dan dilaporkan di fakultas, namun

JAS-PT
JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI
ISSN 2580 – 5339
eISSN 2620 – 5718
Volume 4
Nomor 2
DESEMBER 2020
Hal 97 - 108

FORUM DOSEN INDONESIA

kenyataannya bahwa masih terdapat program studi yang tidak membuat laporan proses pembelajaran dan terdapat pula program studi yang hanya melaporkan dalam bentuk lisan. Begitupun pada tingkat fakultas bahwa dari laporan program studi yang masuk tidak di tindak lanjuti, sehingga tidak adanya perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar penilain pembelajaran di Universitas Ichsan Gorontalo yang dilihat dari pemberian penilaian terhadap tugas mahasiswa masih terdapat dosen yang tidak memberikan penilaian pada tugas mahasiswa. Masih terdapat banyak mahasiswa yang memiliki nilai di bawah dari B, pada hal dalam standar ditetapkan bahwa nilai setiap mahasiswa untuk setiap mata kuliah minimal B per semester.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Ichsan Gorontalo dari hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas belum sepenuhnya mengapresiasi dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi dalam bentuk penghargaan. Tenaga laboratorium dan perpustakaan belum memiliki sertifikasi keahlian sesuai bidangnya. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Ichsan Gorontalo dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa fakultas maupun program studi kurang bahkan tidak lengkap prasarana pembelajaran, misalnya lahan, ruang tata usaha, ruang kantin, dan tempat berolahraga.

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan program studi di Universitas Ichsan Gorontalo belum memiliki rencana kerja tahunan dan masih terdapat program studi yang memiliki rencana kerja namun tidak disahkan dalam bentuk surat keputusan. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap minimnya perbaikan pengelolaan pembelajaran pada program studi. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program studi di Universitas Ichsan Gorontalo belum memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Begitupun halnya sumber dana dan jumlah dana yang dikelola mulai dari universitas hingga program studi tidak disosialisasikan kepada civitas akademik. Selain itu, Universitas juga belum memiliki prosedur dalam pencairan anggaran, sehingga tidak terwujudnya pengelolaan dana yang akuntabel. Selain dari 8 standar yang telah tertuang dalam standar nasional pendidikan tinggi, terdapat pula standar standar yang ditetapkan oleh Universitas Ichsan Gorontalo yaitu standar suasana akademik. Sebagaimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terpenuhinya seluruh pernyataan standar yang telah ditetapkan.

2. Standar Nasional Penelitian

Universitas Ichsan Gorontalo telah menetapkan standar penelitian yaitu terdiri dari (a) standar hasil Penelitian, (b) standar isi Penelitian, (c) standar proses Penelitian, (d) standar penilaian Penelitian, (e) standar peneliti, (f) standar sarana dan prasarana

Penelitian, (g) standar pengelolaan Penelitian, dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Standar tersebut kemudian di tuangkan dalam dokumen standar SPMI Universitas Ichsan Gorontalo.

Pada standar penelitian yang ditetapkan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Ichsan Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan standar hasil penelitian, sebesar 80% dosen Universitas Ichsan Gorontalo melakukan penelitian yang relevansi dengan bidang dan keilmuannya sebagaimana yang ditetapkan. Begitupun dengan publikasi artikel ilmiah sebanyak melebihi standar publikasi yang ditetapkan, namun kebanyakan publikasinya masih dalam bentuk publikasi nasional tidak terakreditasi dan terakreditasi, hanya sebagian kecil yang melakukan publikasi dalam bentuk prosiding dan jurnal internasional. Selain itu keterlibatan mahasiswa dalam penelitian masih sebagian kecil dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi dimana hanya sebagian kecil saja skripsi mahasiswa yang di publikasikan.

Standar isi penelitian Universitas Ichsan Gorontalo yang ditetapkan telah mengacu pada RIP Lembaga Penelitian, baik pada tingkat universitas, fakultas maupun program studi, namun bentuk penelitian masih terbatas pada penelitian kompetitif yang di biayai oleh Universitas dan pembiayaan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) dalam bentuk penelitian dosen pemula dan penelitian dasar. Hal ini dikarenakan klaster Universitas Ichsan Gorontalo masih berada pada klaster binaan. Sedangkan untuk penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi masih di biayai oleh mahasiswa itu sendiri. Standar proses penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Ichsan Gorontalo belum sepenuhnya memenuhi standar sebagaimana dalam pernyataan standar proses penelitian, dimana minimnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan tidak dipublikasikannya skripsi mahasiswa.

Standar penilaian penelitian yang ditetapkan di Universitas Ichsan Gorontalo sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga penelitian telah memeriksa kesesuaian proposal penelitian yang diajukan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP). Akan tetapi lembaga penelitian belum mengecek pelaksanaan penelitian yang dijadwalkan oleh setiap program studi. Jadwal penelitian yang dilakukan program studi akan diketahui oleh lembaga penelitian apabila meminta surat tugas penelitian. Selain itu, proposal yang masuk di lembaga penelitian telah diperiksa dan direkomendasikan kepada peneliti untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh setiap program studi telah dilaporkan pada lembaga penelitian. Selain dari standar penilaian penelitian, juga terdapat standar peneliti dalam melakukan penelitian. Pada standar peneliti tersebut Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi standar dalam hal standar peneliti baik dari segi keilmuan maupun dalam penguasaan metodologi. Hal ini dibuktikan dari peningkatan dari setiap tahun penerima hibah penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian sebagai pendukung kelancaran penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian bidang sosial sarana dan prasarana cukup mendukung pelaksanaan penelitian di setiap program studi, namun untuk bidang eksakta dimana sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai dalam menunjang penelitian-penelitian yang dilakukan. Standar pengelolaan penelitian dalam pemenuhannya dibuktikan dengan tersedianya lembaga sendiri yang membidangi penelitian yaitu Lembaga Penelitian (LEMLIT). Lembaga penelitian memiliki dokumen penelitian yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Tersedianya dokumen panduan penelitian dan setiap tahunnya

JAS-PT
JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI
ISSN 2580 – 5339
eISSN 2620 – 5718
Volume 4
Nomor 2
DESEMBER 2020
Hal 97 - 108

FORUM DOSEN INDONESIA

melaporkan kinerja bidang penelitian. Namun lembaga penelitian masih minim dalam melakukan desiminasi dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang memiliki prestasi. Standar pendanaan penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Ichsan Gorontalo yaitu bahwa pendanaan penelitian bersumber dari internal dan eksternal. Universitas Ichsan Gorontalo. Sumber pendanaan internal untuk penelitian kompetitif dilakukan setiap tahun, begitupun sumber pendanaan eksternal yang diperoleh dari hibah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Ichsan Gorontalo telah menetapkan standar penelitian yaitu terdiri dari (a) standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat, b) standar isi Pengabdian kepada Masyarakat, (c) standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, (d) standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, (e) standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, (f) standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, (g) standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar tersebut kemudian di tuangkan dalam dokumen standar SPMI Universitas Ichsan Gorontalo

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi relevansi bidang keilmuan pada setiap program studi, dan telah sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hasil pengabdian kepada masyarakat hanya sebagian kecil yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional. Standar isi pengabdian masyarakat telah memenuhi standar sebagaimana dalam pernyataan standar yaitu tersedianya dan kesesuaiannya dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. Akan tetapi hanya sebagian kecil hasil pengabdian dilaksanakan yang bersumber dari hasil penelitian. Selain itu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi standar sebagaimana dalam pernyataan standar, dimana setiap dosen telah memiliki rencana pengabdian setiap semester dan melaksanakan serta melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat setiap semester. Bagitupun halnya pada pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang sudah tertuang dalam setiap kurikulum program studi. Model pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa terdiri dari KKLP di Desa dan KKLP pada instansi-instansi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi standar, dimana adanya kesesuaian antara proposal pengabdian dengan waktu pelaksanaan. Adanya tindakan-tindakan koreksi terhadap tidak sesuaian pengabdian kepada masyarakat, serta kesesuaian instrumen penilaian dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi standar, dimana syarat melakukan pengabdian sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Tersedianya form review untuk memastikan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen. Akan tetapi dari segi keterlibatan mahasiswa masih kurang dalam pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Universitas Ichsan Gorontalo belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan, dimana sarana dan prasarana dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan harus menggunakan sarana prasarana dari luar universitas. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi standar, dimana tersedia lembaga khusus yang mengelola pengabdian yaitu Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM). Tersedianya standar pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat dibuktikan dengan

adanya dokumen-dokumen pengelolaan LPM sebagai alat memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ichsan Gorontalo diperoleh dari sumber internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil analisis pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, hal ini terlihat dari seluruh dokumen standar yang ditetapkan telah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari standar pendidikan bidang pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi dalam implementasi siklus penjaminan mutu ternyata penetapan standar masih jauh dari yang diharapkan. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan standar mutu Universitas Ichsan Gorontalo tidak melibatkan pihak *stakeholder* eksternal, sehingga bisa saja terjadi perbedaan antara kebutuhan pihak eksternal dengan keluaran lulusan yang dihasilkan oleh Universitas Ichsan Gorontalo. Kesalahan dalam proses menetapkan standar berimplikasi pada pelaksanaan standar, hal ini terbukti dari pelaksanaan standar pengajaran dimana seluruh pernyataan isi standar yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara konsisten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fitrah, Ruslan, & Hendra, (2018) mengemukakan bahwa dalam meningkatkan mutu, maka sangat penting menerapkan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi agar lulusan nantinya dapat memenuhi kepuasan *stakeholder*. Oleh karenanya setiap temuan-temuan yang didapatkan ditindaklanjuti demi perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Hal yang sama pula yang dikemukakan dalam hasil penelitian Astuti & Utami, (2018) bahwa perlu adanya pembenahan pada atribut-atribut seperti fasilitas komputer, daya tanggap perguruan tinggi, pembelajaran memenuhi kebutuhan dunia kerja dalam hal ini kualitas sehingga meningkatkan kepuasan *stakeholder* yang dampaknya menarik peminat calon mahasiswa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Universitas Ichsan Gorontalo telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dapat dilihat dari ketersediaan dokumen standar. Penunjang pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Ichsan Gorontalo dari aspek sumber daya manusia dan pendanaan masih terbatas. Proses penetapan standar pada Universitas Ichsan Gorontalo belum melibatkan pihak eksternal dalam hal ini *stakeholder* yang berimplikasi pada pelaksanaannya yang tidak konsisten dalam memenuhi isi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang minim membuat pelaksanaan standar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah hendaknya pimpinan Universitas Ichsan Gorontalo melibatkan *stakeholder* eksternal dalam menetapkan standar pendidikan yang dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Pimpinan Universitas Ichsan Gorontalo kiranya mengutus sumber daya manusianya untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan ataupun *workshop* yang diadakan perguruan tinggi lain maupun dari direktorat sistem penjaminan mutu terkait sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Menambah aspek pendanaan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

JAS-PT
JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI
ISSN 2580 – 5339
eISSN 2620 – 5718
Volume 4
Nomor 2
DESEMBER 2020
Hal 97 - 108

FORUM DOSEN INDONESIA

Persantunan

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristek Brin atas pembiayaan yang diberikan pada pelaksanaan Penelitian Kompetitif Dosen Pemula. Kepada Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspranawa, A. D. (2015). Memahami Quality Assurance Menjadikan Budaya Mutu Perguruan Tinggi. *AN-NISBAH*, 1(2), 111-134
- Astuti, S. P., & Utami, D. E. (2018). Pengembangan Kualitas Perguruan Tinggi Islam Berdasarkan Keinginan dan Kebutuhan Stakeholder. *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi (JAS-PT)*, 71-82.
- Fitrah, M., Ruslan, & Hendra. (2018). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu Institute Hindu Dharma Negeri Denpasar*, 4(1), 76-86. Diambil kembali dari <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM>
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran, Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Safi'i, M., & Vidy. (2017). Perancangan Sistem Informasi Badan Penjaminan Mutu Internal Stmik Balikpapan Berbasis Website Responsive. *METIK Jurnal*, 1(2), 1-7.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Interna Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada. *Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17-32. Diambil kembali dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Suryaningsih, T., & Imron, A. (2019). Komitmen Pimpinan Dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada STKIP PGRI Tulungagung). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 5(1), 109-118. Diambil kembali dari <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

JAS-PT

JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI
ISSN 2580 – 5339
eISSN 2620 – 5718
Volume 4
Nomor 2
DESEMBER 2020
Hal 97 - 108

FORUM DOSEN INDONESIA